

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan yang sudah direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek dan sektor di tengah tengah kehidupan bermasyarakat. Pembangunan menjadi agenda yang cukup penting untuk dilakukan oleh setiap negara dan sistem atau struktur internasional demi perubahan ke arah yang lebih baik mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kelembagaan dan budaya. (Kumba, 2019). Setiap negara dan entitas internasional memiliki pemahaman dan praktik program pembangunan yang berbeda antara satu negara dan negara lain. Sehingga, aksi aksi yang dilakukan oleh negara satu dan negara lain pastinya juga memiliki perbedaan dalam hal mendukung agenda pembangunan itu sendiri.

*Islamic Development Bank* adalah suatu bentuk organisasi/institusi ekonomi internasional yang bergerak dalam lingkup multilateral yang bekerja untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan sosial dari komunitas muslim dunia maupun negara anggota. (Islamic Development Bank, 2018). *Islamic Development Bank* didirikan sesuai dengan *The Declaration of*

*Intent* yang diterbitkan oleh *Conference of Finance Ministers of Muslim Countries* yang diadakan di Jeddah pada tahun 1973. Pilar yang dibawa oleh *Islamic Development Bank* yaitu seperti: membuka *partnership* antar pemerintah dan sektor privat, menambah *value* ke sektor ekonomi dan sosial ke negara-negara berkembang melalui peningkatan *skill* dan pengetahuan, fokus dalam pengembangan *science*, teknologi, dan inovasi, mengusung pembangunan global yang berasas jangka panjang, dan berfokus dalam kolaborasi antara anggota dalam bingkai lingkungan non politik untuk kehidupan manusia lebih baik. Dengan berbagai pilar yang diusung oleh *Islamic Development Bank*, membuat *Islamic Development Bank* memiliki kegiatan yang menyokong hal-hal yang bercorak dan tercermin seperti pilar tersebut. Dalam beberapa decade *Islamic Development Bank* kemudian dapat berhasil untuk melaksanakan kunci utama dibangunnya *Islamic Development Bank* yaitu diantaranya kerjasama antar negara selatan (berkembang) serta pelaksanaan agenda pembangunan global berskala panjang. (Islamic Development Bank, 2020).<sup>1</sup>

Dalam melihat pembangunan global kita juga dapat melihat perkembangan istilah pembangunan itu sendiri. Istilah pembangunan

---

<sup>1</sup> Pada penelitian ini istilah dan terminologi "negara berkembang" dan "negara Selatan" merujuk kepada hal arti yang sama dan digunakan bergantian sesuai dengan konteks dari kalimat dan penggunaannya.

kental akan konstruksi bangsa Eropa dan negara maju mengenai pendefinisian pembangunan yang menjadi acuan diberbagai negara. Negara-negara Eropa dan maju cenderung menyandingkan/mendefinisikan pembangunan dengan istilah “*Modernity*” (Modernisasi) (Willis, 2005). Dalam pendekatan modernisasi, pembangunan memiliki kecenderungan untuk menolak asas-asas tradisionalisme yang dianggap sebagai suatu penghambat dalam proses pembangunan (Fakih, 1996). Dalam perkembangannya tidak hanya pendefinisian pembangunan saja yang memiliki kecenderungan asumsi *single approach* namun juga praktik dalam pembangunan itu sendiri. Pendekatan pembangunan berdasarkan asumsi tersebut melahirkan pengukuran pembangunan antar negara bangsa. Pengukuran pembangunan menjadi salah satu hal yang membuat adanya *cluster cluster* dan pengelompokan negara bangsa yang ada di dunia. Pengelompokan didasarkan pada PNB per kapita suatu negara, Koefisien gini, dan *Human Poverty Index* (HPI). Sehingga standarisasi yang demikian memunculkan lahirnya istilah penggolongan negara “North” dan “South”.

Penggolongan negara Utara dan Selatan ini kemudian menjadikan konstelasi hubungan Internasional dan agenda pembangunan menjadi cukup bervariasi. Negara-negara utara merupakan negara yang memiliki kuasa dan *power* yang lebih besar untuk menentukan isu mana yang akan dibahas dan diselesaikan.

Sedangkan negara-negara Selatan kemudian cenderung mengikuti keputusan dan agenda yang sudah ditetapkan. (Jati, 2013). Dikotomi Utara-Selatan cenderung melahirkan suatu bentuk ketimpangan. Ketimpangan tersebut dapat terlihat dalam kenyataan bahwa negara Utara (Core) berada dalam kematangan ekonomi dan negara-negara selatan menurut standar yang ditentukan oleh negara-negara maju cenderung masih berkuat dalam transisi pra-kapitalis menuju kapitalis. (Jati, 2013). Sehingga keadaan ini menggilir surplus dan prioritas agenda pembangunan itu sendiri cenderung berkuat di negara-negara utara dan maju.

Sementara negara-negara selatan cenderung di kesampingkan dalam kerjasama internasional. Negara-negara Selatan kemudian dalam perkembangannya memiliki isu dan permasalahan yang sama sehingga dijadikan sebagai suatu landasan untuk menciptakan sebuah kerjasama untuk agenda pembangunan antar negara selatan. Namun kerjasama antar negara selatan masih menyisakan berbagai masalah dalam pengelolaan serta mekanisme kerjasama antar negara selatan yang sudah berjalan. Sehingga kerjasama pembangunan antar negara selatan masih cenderung dianggap kurang efektif dan efisien terutama dalam payung mekanisme tertentu yang cenderung kurang berperan dan bersifat *complex problem solving*.

Beberapa tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh kerjasama antar negara

selatan adalah yang pertama, adanya persepsi yang salah antara negara donor dan negara *recipient*. Dimana negara selatan donor (berpenghasilan lebih tinggi) cenderung tidak memiliki kepentingan untuk belajar akan permasalahan yang dihadapi oleh negara penerima (penghasilan lebih rendah) dalam suatu kerjasama antar negara selatan. (Kakonge, 2014). Hal ini dapat terlihat dalam bentuk kerjasama selatan selatan yang konvensional mengacu pada “*donor-recipient relationship*”. Dimana negara donor yang kecenderungannya adalah negara berkembang yang diklasifikasikan sebagai *middle income country* terkadang menempatkan diri mereka dalam posisi yang lebih tinggi dari pada negara *recipient* yang notabennya merupakan negara *lower income country*. Sehingga menimbulkan perspektif yang salah dimana negara donor tidak mau banyak berkaca dan belajar akan berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi oleh negara *recipient* yang sebenarnya juga dibutuhkan bagi negara donor karena kesamaan isu, permasalahan dan solusi yang hampir seragam antar negara selatan.

Tantangan lain yang dihadapi dari kerjasama antar negara selatan adalah kurang jelasnya tujuan dan kebutuhan yang ingin dicapai oleh negara selatan yang ikut dalam kerjasama (Kakonge, 2014). Negara selatan kurang memiliki Analisa dan identifikasi yang mendasar atas letak keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan sumber daya yang suatu negara selatan miliki untuk dapat membantu negara

selatan lain yang membutuhkan. Serta negara selatan kurang dapat memetakan kebutuhannya untuk kemudian dibantu oleh negara selatan lain yang memiliki keunggulan komparatif yang sesuai. Sehingga hal tersebut dapat melengkapi kerjasama dan hubungan saling membantu dan membutuhkan dalam kerjasama antar negara selatan.

Selain itu kerjasama antar negara selatan juga cenderung hanya sebatas sebagai forum diplomatik yang kurang berfokus terhadap hal hal yang berurusan dengan konsultasi secara teknis (Mihyo, 1992). Sehingga dibutuhkan peran dari entitas pihak ketiga sebagai entitas internasional diantara kerjasama antar negara selatan yang ikut berperan dalam urusan konsultasi secara teknis. Selain itu sejalan dengan permasalahan ini dimana kerjasama antar negara selatan juga mengalami masalah dalam hal pendanaan dimana negara negara selatan cenderung tidak dapat dengan maksimal saling bekerjasama tanpa adanya pihak ketiga seperti lembaga multilateral internasional. (Kakonge, 2014). Sehingga dibuthkan juga lembaga donor ataupun organisasi internasional untuk memberikan peran berdasarkan posisinya sebagai Lembaga multilateral dalam bentuk kerjasama Triangular.

Dengan berbagai permasalahan yang muncul mulai dari pandangan yang salah antara negara donor dan recipient, kurang jelasnya tujuan dan kebutuhan yang ingin dicapai, serta permasalahan kerjasama antar negara selatan

yang hanya sebatas forum diplomatik dan kurangnya pendanaan (*funding*). Hal ini membuat kerjasama selatan selatan membutuhkan suatu mekanisme yang cukup terarah dan terprogram mulai dari pendanaan, penyelesaian masalah pembangunan, pemetaan keunggulan dan kebutuhan tiap negara selatan, dan perspektif yang sama akan kebutuhan untuk saling belajar satu sama lain antar negara. Kerjasama antar negara selatan sejatinya membutuhkan suatu dukungan dari organisasi maupun institusi internasional yang kemudian dapat menjadi sebuah wadah untuk dapat memberikan suatu kesempatan dan bahkan peran diantara negara negara selatan dalam agenda kerjasama pembangunan.

Salah satu organisasi internasional yang berfokus dalam agenda pembangunan terutama adalah pembangunan antar negara selatan adalah *Islamic Development Bank*. *Islamic Development Bank* dalam operasinya memiliki fokus pada Kerjasama Selatan-Selatan yang semakin terarah. Kapasitasnya sebagai lembaga pembangunan multilateral dan *think tank* menjadikannya sebagai institusi internasional yang memiliki pengaruh dan kontribusi yang cukup besar dalam dunia internasional terutama agenda agenda pembangunan antar negara selatan. *Islamic Development Bank* juga menyatukan berbagai negara negara anggota untuk saling membantu memecahkan masalah dan tantangan pembangunan bersama melalui berbagai program dan mekanisme kerjasama.

Sehingga sampai saat ini Kerjasama Selatan-Selatan dalam hal pembangunan semakin berkembang dan menjadi kerjasama yang semakin terarah dan terstruktur dengan mekanisme kerjasama melalui *Islamic Development Bank*.

*Islamic Development Bank* kemudian menjadi Lembaga multilateral yang memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun dalam aspek pengembangan kerjasama pembangunan. *Islamic Development Bank* memposisikan diri menjadi *Bank of Developers* yang juga mengembangkan perannya ke negara negara selatan sesuai dengan pilar dan nilai yang dimiliki oleh IsDB sesuai dengan keanggotaan IsDB yaitu seluruhnya merupakan negara negara selatan. *Islamic Development Bank* menjadi Lembaga pembangunan yang tak hanya menyediakan pembiayaan saja namun juga menghubungkan berbagai mitra antar negara selatan dan anggota baik pemerintah maupun sektor pendukung lainnya untuk mengembangkan kerjasama pembangunan antar negara negara selatan. *Islamic Development Bank* kemudian berharap melalui mekanisme kerjasama antar negara selatan menjadi cukup mampu untuk memunculkan inovasi-inovasi serta keterlibatan mitra dan partner yang lebih terarah dan efektif dalam suatu kerjasama antar negara selatan.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas maka penulis mengangkat rumusan masalah berikut: *“Bagaimana peran Islamic Development Bank dalam mengembangkan kerjasama pembangunan antar negara selatan?”*

## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab Rumusan Masalah di atas, maka penulis menggunakan 3 kerangka pemikiran berupa konsep sebagai berikut:

### **1. Konsep Peran Organisasi Internasional**

Organisasi Internasional merupakan salah satu konsep yang dapat dikatakan mampu untuk menjawab tantangan dunia hingga saat ini terutama menjaga perdamaian dunia dan wadah kerjasama. Organisasi internasional dipandang dapat mengelola dunia dengan baik sehingga dapat terciptanya perimbangan kekuatan yang mengarah kepada terpeliharanya perdamaian (Sugito, 2016). Organisasi internasional yang eksis hingga saat ini dan dalam perkembangannya menjadi cukup pesat dikalangan internasional diyakini memiliki peranan yang cukup penting dalam mendukung kerjasama negara negara. Organisasi Internasional memberikan sebuah kerangka dan wadah bagi negara negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan adanya

kesepakatan dalam politik internasional dan seiringan dengan tingkat interaksi di antara negara yang juga semakin meningkat.

Perkembangan yang cukup pesat dalam bentuk kerjasama antar negara melalui pola organisasi internasional, telah memperlihatkan dan menonjolkan pentingnya peran organisasi internasional yang bukan hanya melibatkan antar negara dan pemerintah saja. Negara tetap dikatakan sebagai aktor utama dan paling dominan dalam kerjasama internasional dalam bentuk dan pola organisasi internasional (Rudy, 2009). Namun, perlu diakui bahwa yang terlibat didalamnya tidak hanya selalu aktor paling dominan saja yaitu negara. Ada berbagai aktor aktor yang dapat terlibat didalamnya seperti organisasi non-pemerintahan, kalangan akademisi, praktisi, individu, kelompok masyarakat dll. Organisasi Internasional juga banyak bertumbuh dikarenakan adanya kebutuhan dan berbagai kepentingan di dalam masyarakat antar bangsa sebagai suatu bentuk terstruktur, wadah serta alat untuk melaksanakan suatu kerjasama internasional.

Organisasi Internasional memiliki payung fungsi utama adalah memberikan wadah bagi kerja sama di antara negara-negara anggotanya. Namun fungsi utama

tersebut juga berkembang, bahwa organisasi internasional juga sebagai alat administrative untuk mengubah kebijakan menjadi suatu tindakan nyata. Fungsi lain adalah organisasi internasional menjadi suatu wadah dan saluran komunikasi yang cukup kompleks untuk menyalurkan berbagai kepentingan nasional suatu negara dan berbagai permasalahan yang ada di dalam negara untuk kemudian dapat di ambil solusi atas segala permasalahan yang dirundingkan di dalam forum yang disediakan oleh suatu organisasi internasional.

Menurut Harold K. Jacobson organisasi internasional memiliki fungsi dalam kegiatan operasionalnya. Fungsi pertama yaitu fungsi informasi yaitu fungsi pengumpulan, Analisa, pertukaran dan desminasi data serta informasi yang dibutuhkan. Fungsi yang kedua adalah fungsi normative meliputi pendklarasian suatu norma standar, fungsi ini tdk mengikat secara hukum namun lebih sebatas pernyataan pernyataan yang mempengaruhi lingkungan domestic dan internasional. Fungsi yang ketiga adalah pembuatan aturan yang mengikat secara hukum. Fungsi yang keempat adalah fungsi pengawasan yaitu mengawasi berbagai peraturn yang dibuat. Fungsi kelima ialah fungsi operasional meliputi penggunaan sumber daya organisasi.

Menurut Karen Mingst pada tingkat internasional organisasi internasional juga memiliki peranan dalam politik global. (Sugito, 2016) peranan yang pertama adalah memberikan kontribusi untuk terciptanya suatu kerjasama diantara negara dan aktor internasional. Peran yang kedua adalah menyediakan informasi dan pengawasan dimana organisasi internasional menyediakan informasi, hasil hasil survei dan juga pengawasan. Peran OI yang ketiga adalah memberikan bantuan terhadap suatu permasalahan. Peran yang keempat adalah organisasi internasional berperan dalam mengkoordinir aktivitas internasional mengenai suatu permasalahan bersama. Peran kelima ialah menyediakan suatu arena untuk negara negara yang kemudian melakukan bargaining dalam menyelesaikan suatu masalah. Peran kelima adalah membentuk suatu rezim internasional.

Menurut Clive Archer ia membedakan secara tegas adanya perbedaan antara peranan dan fungsi organisasi internasional. Menurut Archer peran organisasi internasional terdiri dari tiga peranan. Yang pertama adalah organisasi internasional sebagai Instrumen (alat/sarana) dimana organisasi internasional digunakan untuk mencapai suatu kesepakatan, menekan suatu konflik,

dan menyelaraskan tindakan. Yang kedua adalah organisasi internasional sebagai arena (forum/wadah) dimana organisasi internasional dijadikan sebuah wadah untuk berhimpun, berkonsultasi dan membuat keputusan akan perumusan perjanjian-perjanjian internasional. Yang ketiga adalah organisasi internasional sebagai pelaku atau aktor yang bertindak secara autonomus sebagai satu entitas internasional dan bukan lagi sebagai pelaksana kepentingan anggota-anggotanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan menggunakan konsep organisasi internasional dan terspesifik adalah peran organisasi internasional. Dengan menggunakan konsep peran organisasi internasional maka penulis dapat memberikan penjabaran dan Analisa mengenai peran yang dilakukan oleh *Islamic Development Bank* dan posisinya sebagai organisasi internasional sebagai Lembaga multilateral dalam mekanisme reverse linkage. Dengan menggunakan konsep ini maka penulis dapat mengidentifikasi berbagai peran yang telah dilakukan oleh *Islamic Development Bank* melalui mekanisme reverse linkage dalam kerjasama pembangunan antara negara negara selatan.

*Islamic Development Bank* sebagai suatu organisasi memiliki peranan

dalam mekanisme kerjasama pembangunan antar negara selatan. *Islamic Development Bank* melaksanakan berbagai program dalam rangka menyelesaikan berbagai tantangan melalui kerjasama antar negara selatan untuk kemudian menyelesaikan dan memecahkan suatu isu dan masalah dalam hal pembangunan. Menggunakan mekanisme kerjasama *Reverse Linkage* maka dapat terlihat dimana *Islamic Development Bank* memiliki posisi sebagai organisasi internasional yang menjadi konektor untuk memobilisasi sumber daya dan mengidentifikasi berbagai permasalahan serta menyediakan solusi yang bersumber dari sumber daya antar negara selatan dalam bingkai mekanisme kerjasama tersebut.

## 2. **Konsep Pembangunan**

Pembangunan adalah suatu istilah yang merujuk kepada pengharapan, sebuah jalan dan merupakan sebuah *instrument* atau alat yang digunakan oleh aktor negara untuk kemudian dapat memenuhi dan mencapai kepentingan nasionalnya yang sudah dibentuk dan dikonstruksikan oleh pemerintah terkait. (Willis, 2005). Kemudian dalam perkembangannya pembangunan menjadi suatu istilah yang cukup populer untuk kemudian digunakan negara sebagai suatu

program pemerintah yang dapat mencapai kepentingan nasional suatu negara secara efektif. Setiap negara dan entitas internasional memiliki pemahaman dan praktik program pembangunan yang berbeda antara satu negara dan negara lain. Sehingga, aksi aksi yang dilakukan oleh negara satu dan negara lain pastinya juga memiliki perbedaan dalam hal mendukung pembangunan itu sendiri.

Pembangunan sendiri memiliki berbagai pendekatan dan paradigma untuk memahaminya. Terdapat 2 paradigma besar dalam pembangunan yaitu modernisasi dan ketergantungan (Digdowiseiso, 2019). Dengan begitu maka pengertian akan pembangunan sendiri bermacam macam dan menjadi hal yang banyak diperdebatkan. Banyaknya pengertian mengenai pembangunan juga menjadi hal yang cukup penting bagi praktik praktik pembangunan di setiap negara. Dengan begitu maka praktik pembangunan juga bermacam macam dan mengikuti berbagai kebutuhan yang ada.

Ilmuwan ilmuwan pembangunan sendiri banyak yang kemudian memberikan definisi masing masing mengenai arti dari pembangunan itu sendiri. Dimulai dari pendekatan klasik seperti Adam Smith yang mengajarkan mengenai pasar dan konsep “Invisible hand” nya yang mengatur, David Ricardo

dengan perdagangan bebas antar negara dengan mengedepankan keunggulan komparatif tiap negara, disusul kemudian oleh Karl Marx dengan konsep “ekonomi terpimpin”, hingga J.M Keynes yang memberikan pemahaman akan perpaduan diantara kebebasan dan pengaturan atau peran dari pemerintah, beralih ke pandangan yang lebih kontemporer seperti teori tarikan besar (big Push) hingga pertumbuhan seimbang (Balanced Growth). Pendekatan lain adalah pendekatan ketergantungan seperti Teori Sistem Dunia oleh Immanuel Wallerstein dimana ia memberikan asumsi bahwa negara bangsa merupakan unit analisa dalam pembangunan. Negara bangsa dalam perkembangan kapitalisme kemudian terbagi menjadi Core, Semi periphery, dan Periphery. (Mudzakkir, 2021). Pemikiran ini merupakan sasaran kritik dari paradigma modernisasi.

Disamping seluruh perbedaan tersebut sebenarnya agenda pembangunan sendiri merupakan hal yang cukup penting bagi bangsa maupun secara global. Pembangunan sendiri terjadi di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berlangsung diberbagai level masyarakat hingga ke sistem internasional. Meningkatnya kebutuhan masyarakat dan dan semakin kompleksnya kehidupan



masyarakat juga semakin naiknya berbagai tuntutan mengenai pembangunan. Pembangunan tidak hanya diartikan sebagai aspek ekonomi dan industri saja namun juga mencakup aspek aspek kebutuhan masyarakat lain seperti teknologi, sosial, budaya aspek politik, dsb. Pembangunan juga dijadikan agenda untuk kemudian membawa negara/bangsa menuju ke keadaan lebih baik di berbagai sisi.

Penulis menggunakan konsep pembangunan sebagai landasan kerangka berpikir untuk kemudian dapat memberikan Analisa pembangunan antar negara selatan. Dimana negara negara selatan merupakan negara negara yang tidak termasuk kedalam negara core atau inti yang memiliki kekuatan pembangunan yang sudah cukup *advanced*. Negara negara selatan kemudian memiliki kebutuhan dan isu dalam agenda pembangunan negara mereka dan membutuhkan kerjasama antar negara selatan yang saling memiliki problematika serupa untuk kemudian saling menyelesaikan permasalahan yang ada. Tidak hanya aspek dan sektor ekonomi industri saja namun juga di ranah teknologi, sosial, budaya dan politik yang menyangkut berbagai aktor aktor lain seperti Lembaga non pemerintahan, akademisi, masyarakat, praktisi dsb.

Dengan mekanisme Reverse Linkage ini merupakan sebuah mekanisme yang mempertemukan Lembaga multilateral *Islamic Development Bank* dan negara negara selatan dalam agenda pembangunan.

Dalam bingkai mekanisme *Reverse Linkage* negara negara selatan saling bekerjasama dalam hal pembangunan yang mengedepankan kerjasama berbasis solidaritas diatas keuangan. Menggunakan konsep pembangunan sendiri dapat terlihat kerjasama melalui mekanisme *Reverse Linkage* yang akan melibatkan beberapa aspek penting melalui agenda utama pembangunan yang menunjang agenda pembangunan itu sendiri. Mekanisme *Reverse Linkage* sebagai bingkai utama pembangunan antar negara selatan dan *Islamic Development Bank* juga akan melibatkan sektor teknologi, pertanian, edukasi, sanitasi, administrasi public, kesehatan, dan pendanaan. Sehingga agenda pembangunan antar negara selatan berdasarkan isu serta permasalahan yang muncul antar negara negara selatan dapat dengan baik berjalan melalui sebuah mekanisme kerjasama pembangunan global *Reverse Linkage*. Mekanisme ini merupakan sebuah sistem internasional yang bergerak dalam hal pembangunan dengan lingkup agenda global.

### **3. Konsep Kerjasama Triangular Selatan-Selatan**

Seiring dengan kebutuhan dan tantangan yang muncul antar negara negara berkembang serta perekonomian yang semakin tumbuh maka kerjasama selatan-selatan merupakan bagian yang cukup penting bagi agenda pembangunan secara global. Kerjasama Triangular Selatan-Selatan merupakan kerjasama yang dinisiasi oleh negara negara selatan dengan berdasarkan atas kesamaan kebutuhan, pandangan, tujuan, serta permasalahan yang dihadapi oleh negara negara selatan. Kerjasama Triangular melibatkan juga berbagai dimensi aktor dalam melaksanakan proses kerjasama yang ada.

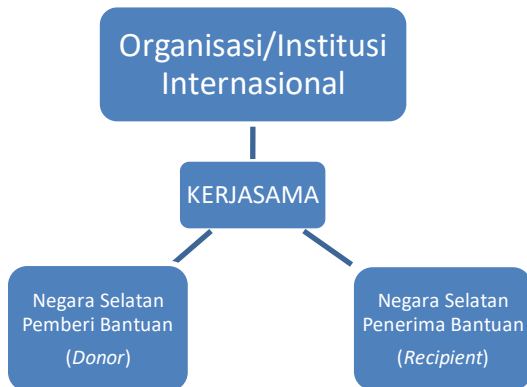
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa Kerjasama Selatan-Selatan didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antar negara selatan yang saling berupaya bersama sama untuk mengejar tujuan serta kebutuhan mereka dalam pengembangan kapasitas nasional yang lahir dari pengalaman dan kebutuhan bersama. Kerjasama Selatan-Selatan memiliki prinsip prinsip dalam agendanya seperti penghormatan terhadap kedaulatan dan kepemilikan nasional. Kerjasama Selatan-Selatan dilihat sebagai kerangka kerjasama yang cenderung mengarah ke kemitraan antar aktor yang terlibat

dibandingkan dengan bantuan pembangunan dengan mengedepankan asas solidaritas. Selain itu Kerjasama Selatan-Selatan memiliki pendekatan multi-stakeholder dimana kerjasama ini melibatkan berbagai aktor seperti negara, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, individu, masyarakat, akademisi, peneliti, ilmuwan, dan aktor lain yang saling berkontribusi untuk memenuhi tantangan dan tujuan pembangunan (UN, 2016).

Menurut Kakonge memberikan suatu penjelasan bahwa Kerjasama Selatan-Selatan merupakan hubungan diantara dua atau lebih negara negara selatan (berkembang) yang mengejar tujuan pembangunan nasional melalui kerangka kerjasama berupa pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, sumberdaya, ketrampilan dsb yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan antar negara (Kakonge, 2014). Definisi yang diberikan oleh Kakonge memberikan indikasi bahwa kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dapat berupa suatu kerangka kerjasama antar beberapa negara negara selatan yang kemudian saling melakukan agenda bersama dan pertukaran atas kebutuhan dan kemampuan masing masing negara.

Sementara kerjasama Triangular diartikan sebagai bentuk kerjasama terdiri dari dua atau lebih negara selatan dengan

memiliki peran dan posisi masing masing negara yang berbeda beda serta melibatkan entitas atau aktor yang lebih tinggi (Kakonge, 2014). Kerjasama Triangular selain melibatkan negara negara selatan mekanisme kerjasama ini memberikan sistem dimana negara maju dan institusi multilateral seperti Lembaga donor atau organisasi internasional seperti PBB. Peran Lembaga multilateral adalah sebagai pendukung dalam inisiatif mekanisme kerjasama Triangular. Inisiatif yang muncul untuk melakukan kerjasama harus muncul dari negara negara selatan yang kemudian melalui Lembaga multilateral diberikan dukungan. Mekanisme yang demikian dapat dikatakan sebagai mekanisme kerjasama Triangular.



**Bagan 1. Konfigurasi Skema Kerjasama Triangular Selatan-Selatan**

Sumber: *Apresian: Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Sebagai Instrumen Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Global, 2016*  
(Apresian, 2016)

Dengan begitu maka dalam penelitian ini dapat kita lihat bahwa negara negara selatan yang terlibat dalam mekanisme reverse linkage merupakan anggota dari mekanisme kerjasama ini. Sementara *Islamic Development Bank* merupakan organisasi internasional yang perannya sebagai institusi multilateral yang memberikan dukungan dan sebagai pihak yang memberikan bentuk pengelolaan kebutuhan sumber daya dan kebutuhan antar negara selatan. *Islamic Development Bank* memiliki posisi sebagai organisasi internasional yang menjadi perantara dan fasilitator dalam mekanisme kerjasama Reverse Linkage. Sehingga seluruh sumber daya yang dimiliki oleh negara negara selatan dan berbagai penyalurannya akan melewati *Islamic Development Bank* sebagai pihak yang mengelola dan menjadi mediator kerjasama ini.

Dalam mekanisme kerjasama Reverse Linkage dapat terlihat pola hubungan dari skema diatas. Masing masing negara selatan yang memiliki problematika dan sumber daya serta keahlian yang dimiliki masing masing

berkenan untuk didirikan resources centre oleh *Islamic Development Bank*. *Islamic Development Bank* sebagai organisasi internasional yang kemudian mengumpulkan berbagai data dan informasi dari negara negara selatan yang mengikuti kerjasama dari berbagai resources centre yang ada di berbagai negara. Melalui resource centre yang ada kemudian *Islamic Development Bank* memberikan berbagai arahan serta pencocokan kebutuhan antara keunggulan dan sumber daya negara donor dengan kebutuhan dan problematika negara recipient dan dipertemukan dalam skema kerjasama.

#### **D. Hipotesis**

Dari Berdasarkan penjelasan dan data di atas penulis menyimpulkan jawaban sementara peran *Islamic Development Bank* dalam mengembangkan kerjasama pembangunan antar negara selatan adalah:

1. *Islamic Development Bank* sebagai suatu arena (forum/wadah) dalam pertemuan internasional dan kerjasama antar negara selatan melalui mekanisme kerjasama reverse linkage. *Islamic Development Bank* menjadi suatu bentuk wadah dimana negara negara selatan dapat saling bekerjasama dalam bingkai kerjasama yang diprakarsai oleh *Islamic Development Bank*. Saling tukar sumber

daya yang dibutuhkan dalam hal pembangunan dapat dilakukan oleh negara-negara selatan melalui mekanisme reverse linkage gagasan *Islamic Development Bank*.

2. *Islamic Development Bank* sebagai suatu instrument (alat/sarana) antar negara selatan dalam melakukan kerjasama melalui mekanisme Reverse Linkage. *Islamic Development Bank* menjadi sebuah alat dimana negara-negara selatan saling berhimpun dan berkonsultasi mengenai pemetaan kebutuhan dan pembangunan antar negara selatan serta keunggulan komparatif masing-masing negara melalui mekanisme reverse linkage gagasan *Islamic Development Bank*.
3. *Islamic Development Bank* sebagai aktor independen yang memiliki kapasitas sebagai leader dan memberikan dukungan melalui mekanisme kerjasama *Reverse Linkage*. *Islamic Development Bank* memiliki posisi sebagai fasilitator dan konektor serta lembaga multilateral yang juga memiliki posisi sebagai *financer*. *Islamic Development Bank* sebagai entitas yang memiliki posisi puncak untuk memberikan bentuk yang mengelola kebutuhan, permasalahan serta sumber daya antar negara selatan yang masuk ke dalam mekanisme kerjasama *Reverse Linkage*.



## **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mempelajari dan mengetahui tentang fenomena pembangunan secara global terutama dalam mekanisme Kerjasama Pembangunan antar negara negara selatan. Kerjasama pembangunan antar negara selatan tersebut kemudian berkembang sehingga aktor insitutsi multilateralisme memiliki posisi dan juga ikut berperan dalam kerjasama tersebut. Salah satunya adalah *Islamic Development Bank* yang berperan sebagai institusi multilateral dalam mekanisme Reverse Linkage. Penelitian ini akan menganalisa bagaimana peran yang dilakukan oleh *Islamic Development Bank* dan posisinya dalam mekanisme kerjasama antar negara selatan Reverse Linkage.

## **F. Metode Pengumpulan Data dan Analisa Data**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)**

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan yaitu pengumpulan data berupa data-data sekunder yang diperoleh dari buku, skripsi, tesis, dan jurnal untuk menguatkan dan mendukung Analisa dan penjelasan dari skripsi ini. Berbagai data tersebut

kemudian dijadikan sebagai referensi dan bahan utama untuk menganalisa fenomena yang diangkat. (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

#### **b. Penelitian Media**

Penelitian ini mendapatkan data pendukung lainnya dari berbagai media seperti berita, *report*, essay, dokumen-dokumen pendukung, serta informasi yang tercantum dalam *website* dan media massa lain untuk mendukung penjelasan dari penelitian.

## **2. Analisa Data**

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah metode analisis data kualitatif yang menekankan pada aspek penalaran dan pemahaman terhadap masalah yang dibahas. (Bakry, 2016). Penelitian ini bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran pemahaman yang lebih mendalam terkait peran dan posisi *Islamic Development Bank* dalam pengembangan pembangunan negara selatan melalui mekanisme Reverse Linkage.

### 3. Interpretasi Data

Peneliti melakukan interpretasi data dengan menghubungkan hasil analisis data dengan kerangka pemikiran kemudian meninjau keterkaitan antara model yang digunakan dalam kerangka pemikiran dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu kerangka pemikiran juga digunakan untuk melihat permasalahan yang ada. Interpretasi juga dilakukan dengan memberikan tambahan pandangan kritis terhadap analisis data yang telah dilakukan.

#### G. Jangkauan Penelitian

Batasan dalam penulisan ini adalah diantara tahun 2017-2020 dimana awal mula diluncurkan mekanisme kerjasama Reverse Linkage hingga tahun 2020. Dalam tahun ini juga melihat peran dan posisi *Islamic Development Bank* dalam mekanisme kerjasama antar negara selatan melalui mekanisme reverse linkage.

#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi ke dalam lima bagian (bab) yang kemudian digunakan untuk menjelaskan hasil dari penelitian ini.

**BAB I:** Merupakan pendahuluan dan bab awal yang berisikan latar belakang masalah yang

dibahas, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Bab kedua akan memuat penjelasan mengenai *Islamic Development Bank* sebagai institusi multilateral dan berbagai program yang dilaksanakan *Islamic Development Bank* yang salah satunya adalah mekanisme kerjasama antar negara selatan yaitu Reverse Linkage.

**BAB III:** Bab ketiga akan berisikan mengenai penjelasan gambaran serta isu kontemporer mengenai problematika dan berbagai permasalahan pembangunan antar negara selatan mulai dari problematika di level negara hingga problematika kerjasama antar negara selatan secara agenda pembangunan global.

**BAB IV:** Bab keempat akan memuat analisis peran *Islamic Development Bank* dalam pengembangan kerjasama pembangunan antar negara selatan melalui mekanisme kerjasama Reverse Linkage pada tahun 2017-2020.

**BAB V:** Bab kelima merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan penutup.